

ABSTRAK

Perhatian khusus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini salah satunya yaitu tentang maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Terhadap perhatian itulah pemerintah melakukan segala upaya agar tidak membawa dampak yang luas bagi masyarakat apabila tidak dikendalikan oleh pemerintah. Salah satu zat yang dapat memberikan dampak negatif bagi suatu bangsa adalah Narkotika, Polri merupakan aparat terdahulu dalam rangka penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu tugas pokok Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Semarang, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Semarang, bagaimanakah solusi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Semarang.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi juga melihat perkembangan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Polri dalam penyidikan tindak pidana Narkotika mengembangkan metode yang tepat dan cepat sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika. Sebelum meningkat ke tahap penyidikan tindak pidana narkotika, penyelidikan adalah tahap yang tidak kalah penting. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika dalam pengungkapannya diperlukan penyelidikan yang matang, mengingat awal dari penyidikan adalah tertangkapnya pelaku tindak pidana narkotika berikut barang bukti narkotika yang disebut sebagai tertangkap tangan. Teknik-teknik dari penyelidikan tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan dengan cara observasi, undercover agent, undercover buy, controlled delivery, dan rain planning execution. Sedangkan pelaksanaan penyidikan dilakukan dengan cara yang telah diatur dan ditetapkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika terdapat hambatan-hambatan baik hambatan yuridis maupun non yuridis. Hambatan-hambatan tersebut bukan kemudian membuat pelaksanaan penyidikan berhenti, akan tetapi merupakan tantangan bagi penyidik untuk mencari solusinya. Salah satu hambatan yuridis adalah tidak cukupnya alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan urine milik tersangka. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, penyidik harus bisa membuktikan bahwa selain pengguna tersangka adalah juga orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau bahkan sebagai pengedar. Sedangkan hambatan non yuridis yaitu salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran hukum yang ada dimasyarakat. Untuk diperlukan berbagai macam penyuluhan tentang bahaya dan ancaman hukuman bagi para pelaku. Selain itu para penyidik harus selalu meningkatkan kemampuan penyidikan melalui pendidikan dan kejuruan.

Kata kunci: Pelaksanaan, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

Special attention is carried out by the Indonesian government is one that is on the proliferation of illicit trafficking and abuse of narcotics. With concern that the government make every effort not to bring a broad impact for the community if it is not controlled by the government. One of the substances that can negatively affect a nation is a narcotic, a police apparatus leading the enforcement of justice. This is in accordance with Article 13 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police is the principal task of the republic of Indonesia is to maintain security and public order, enforce the law and provide the missing protection of shelter and services to the community.

As for the purpose of this study is to identify and explain the implementation of the Criminal Investigations Narcotics in the jurisdiction of Police Semarang, what are the obstacles in the implementation of criminal investigations of narcotics in the jurisdiction of Police Semarang, how solutions to overcome barriers to the implementation of criminal investigations of narcotics in the region Semarang Police law.

To achieve these objectives the author uses the method of approach is an approach that is not only based on the provisions of the legislation but also look at developments in society.

Based on the results that the police in criminal investigations of Narcotics. Develop appropriate methods and fast for the reduction and eradication of Narcotics. Before rising to the stage of investigation of criminal narcotics investigation phase is no less important. That is because the narcotic crime in the disclosure required thorough investigation, given the start of the investigation was the arrest of perpetrators of criminal acts following narcotics evidence called as caught red-handed. The techniques of investigation of the crime of Narcotics is done by observation, undercover agent, undercover buy, controlled delivery, and execution planning rain. While the implementation of an investigation conducted in a manner that has been set and specified in the Code of Criminal Procedure and the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics.

In the implementation of criminal investigations narcotics there are barriers to both judicial and non judicial barriers. The obstacles are not then make the implementation of the investigative stops, but a challenge for investigators to find a solution. One of the juridical obstacles is insufficient documentary evidence in the form of Minutes of the results of urine examination of a suspect. Solutions to overcome these obstacles, the investigator must be able to prove that in addition to suspect users are also people who possess, store, control or even as a dealer. While non juridical obstacles which one of them is still low awareness of existing legal community. For required a wide range of education about the dangers and threats of punishment for the perpetrators. In addition, the investigator must always improve investigative capability through education and vocational

Keywords: Implementations, Investigation, Crime Narcotics.